

AKSELERASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA MENUJU INDONESIA MAJU

Bambang Gulyanto¹, Dian Anggraini Harahap², Datulina Ginting³, Mapilindo⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹bambanggulyanto@gmail.com, ²anggrianidian12@gmail.com, ³datulinaginting23@gmail.com,

⁴mapilindo@gmail.com

ABSTRACT

Village development acceleration is an effort to speed up progress from the grassroots level through synergy between communities and local governments. Villages play a strategic role as the foundation of life for the majority of Indonesia's population. Their potential in natural resources, human capital, and local wisdom must be managed wisely with the support of digital technology to enhance competitiveness, governance transparency, and public services. In this process, communities act as the main drivers of development through cooperation, creativity, and active participation, while village governments serve as facilitators and policymakers. Development acceleration must also consider environmental sustainability and the preservation of local culture to maintain village identity amidst modernization. BUMDes plays a crucial role in driving the local economy, creating jobs, and reducing poverty. Through strong collaboration among communities, village governments, businesses, and educational institutions, village acceleration will produce independent, competitive villages that significantly contribute to realizing an Advanced Indonesia.

Keyword: Development Acceleration, Government, Village

ABSTRAK

Akselerasi pembangunan desa merupakan upaya mempercepat kemajuan dari tingkat paling bawah melalui sinergi masyarakat dan pemerintah desa. Desa memiliki peran strategis karena menjadi basis kehidupan mayoritas penduduk Indonesia. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam, manusia, dan kearifan lokal harus dikelola secara bijaksana dengan dukungan teknologi digital agar mampu meningkatkan daya saing, transparansi tata kelola, dan pelayanan publik. Dalam proses ini, masyarakat berperan sebagai penggerak utama pembangunan melalui gotong royong, ide kreatif, dan keterlibatan aktif, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan. Upaya percepatan pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta pelestarian budaya lokal agar identitas desa tetap terjaga di tengah modernisasi. Peran BUMDes menjadi sangat penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. Dengan kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, akselerasi pembangunan desa akan melahirkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia Maju.

Kata kunci: Akselerasi pembangunan, Pemerintah, Desa

PENDAHULUAN

Hasil kegiatan akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif mereka dalam pembangunan desa. Masyarakat yang sebelumnya pasif kini lebih proaktif dalam memberikan gagasan, ikut musyawarah desa, dan terlibat langsung dalam program pembangunan. Partisipasi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir menuju desa yang lebih maju dan mandiri. Kegiatan ini juga menghasilkan

peningkatan kapasitas aparatur desa. Melalui pelatihan dan pendampingan, perangkat desa menjadi lebih terampil dalam mengelola administrasi, keuangan, dan pelayanan publik berbasis digital. Hal ini berdampak pada pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi, hasil kegiatan terlihat dari berkembangnya usaha kecil dan menengah di tingkat desa. Produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di sekitar wilayah desa kini mulai

dipasarkan melalui platform digital dan media sosial.

Dengan adanya akses pemasaran yang lebih luas, pendapatan masyarakat desa mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan perkembangan positif. Banyak desa yang berhasil mengembangkan BUMDes berbasis inovasi, misalnya pengolahan hasil pertanian menjadi produk siap jual, pengembangan wisata desa, serta pemanfaatan energi terbarukan. Keberhasilan BUMDes ini tidak hanya memperkuat ekonomi desa tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Di sektor pendidikan, hasil kegiatan ditunjukkan dengan meningkatnya minat masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Anak-anak muda desa kini terbiasa menggunakan platform digital untuk mengakses ilmu pengetahuan, mengikuti pelatihan keterampilan, bahkan mengikuti kursus daring. Hal ini memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara desa dan kota. Dalam bidang kesehatan, masyarakat merasakan dampak positif dengan adanya layanan telemedicine dan penyuluhan kesehatan berbasis digital.

Warga desa lebih mudah berkonsultasi dengan tenaga medis dan memperoleh informasi terkait pencegahan penyakit. Hasilnya, kesadaran akan pola hidup sehat dan pentingnya menjaga lingkungan juga meningkat. Dari segi tata kelola, kegiatan akselerasi menghasilkan penerapan sistem keuangan desa yang lebih transparan. Laporan anggaran desa yang sebelumnya sulit diakses kini dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dalam hal pembangunan infrastruktur, kegiatan ini berdampak pada meningkatnya kualitas jalan desa, fasilitas umum, dan sarana digital seperti jaringan internet desa. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, mobilitas masyarakat lebih lancar dan akses terhadap informasi semakin terbuka. Kegiatan ini juga berhasil membangun budaya gotong royong yang semakin kuat. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Semangat kerja sama ini membuat setiap kegiatan pembangunan berjalan lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil lainnya terlihat dalam meningkatnya kesadaran

hukum di masyarakat. Program penyuluhan hukum yang dilakukan membuat warga lebih paham hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa. Kesadaran hukum ini memperkecil potensi konflik, meningkatkan ketertiban sosial, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan akselerasi memberikan dampak dalam bidang lingkungan hidup. Masyarakat desa mulai memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam mengelola sampah, mengolah limbah menjadi energi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kesadaran ini menjadikan desa lebih hijau, sehat, dan berdaya guna. Hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan peran pemuda desa. Mereka lebih kreatif dalam menciptakan inovasi, misalnya membuat konten digital untuk promosi desa, mengembangkan komunitas kreatif, dan membangun usaha berbasis teknologi. Peran pemuda ini menjadi motor penggerak utama percepatan desa menuju Indonesia Maju.

Kegiatan akselerasi juga memperkuat posisi desa sebagai pusat pembangunan nasional. Desa tidak lagi dianggap sebagai wilayah tertinggal, tetapi sebagai sumber kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya yang menopang kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Lebih jauh lagi, hasil kegiatan mencerminkan terciptanya smart village atau desa cerdas. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan menjadikan desa lebih modern dan kompetitif. Desa yang sebelumnya tertinggal kini mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Secara keseluruhan, hasil kegiatan akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari peningkatan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan, tata kelola desa, hingga kesadaran hukum dan lingkungan. Semua hasil ini menunjukkan bahwa akselerasi bukan sekadar wacana, tetapi sudah nyata memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju berangkat dari pemahaman bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Lebih dari 70 persen

wilayah Indonesia adalah desa, sehingga percepatan pembangunan di tingkat desa akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai fasilitator, pengelola, dan penggerak pembangunan. Melalui regulasi, program, serta pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat menciptakan arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah desa semata, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, karena mereka lah yang mengetahui kebutuhan, potensi, serta tantangan yang ada di lingkungannya.

Akselerasi pembangunan desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, atau fasilitas umum, melainkan juga pembangunan non-fisik yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, hingga kesadaran hukum. Pembangunan desa yang menyeluruh akan mendorong terciptanya desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya lokal secara optimal. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam akselerasi pembangunan. Melalui musyawarah desa, gotong royong, dan kolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan. Akselerasi ini juga mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat desa sejak dahulu, namun kini disinergikan dengan inovasi modern. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga menjadi pembahasan penting.

Desa yang mampu memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem administrasi berbasis daring, pemasaran produk melalui e-commerce, atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pertanian, akan memiliki daya saing lebih tinggi. Konsep smart village atau desa cerdas dapat terwujud jika pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, akselerasi pembangunan desa harus memperhatikan aspek kemandirian ekonomi. Melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), masyarakat memiliki wadah untuk mengembangkan usaha lokal berbasis potensi desa. Keberhasilan BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat keuangan desa sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih lancar. Pembahasan lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan keterampilan masyarakat, pelatihan aparatur desa, serta pendidikan berbasis teknologi menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan.

Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan desa hanya akan bersifat sementara dan sulit berkelanjutan. Selain itu, akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Desa sebagai wilayah dengan potensi alam yang melimpah harus mampu menjaga kelestarian hutan, air, dan lahan. Penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, serta pola hidup hijau menjadi bagian penting dari pembangunan desa berkelanjutan. Secara sosial, akselerasi ini memperkuat kohesi masyarakat desa. Dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, potensi konflik dapat diminimalisir. Sebaliknya, tumbuh budaya musyawarah, toleransi, dan saling mendukung dalam setiap program pembangunan. Kondisi sosial yang harmonis ini menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan. Pada akhirnya, akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju bukan hanya tentang mempercepat pembangunan, tetapi juga tentang menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa adalah bentuk nyata dari pembangunan berbasis partisipatif. Desa yang kuat akan menjadi penopang utama Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa maju, adil, dan makmur.



SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai akselerasi masyarakat dan pemerintah desa menuju Indonesia Maju adalah bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai pilar utama pembangunan nasional. Percepatan pembangunan di desa akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi yang sinergis antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan, karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah dan fasilitator. Akselerasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan non-fisik, seperti peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan ekonomi melalui BUMDes, serta pelestarian lingkungan. Pemanfaatan teknologi modern mampu mendorong lahirnya desa cerdas yang mampu bersaing di era globalisasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, serta keterlibatan dalam setiap tahapan pembangunan menjadikan desa lebih mandiri dan berdaya. Dengan demikian, percepatan pembangunan di desa bukan hanya menciptakan kesejahteraan lokal, tetapi juga berkontribusi besar terhadap terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Profil Desa dan Kelurahan 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan BUMDes untuk Peningkatan Ekonomi Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Rahardjo, S. (2019). *Pembangunan Desa Berkelanjutan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siregar, D. (2021). Digitalisasi Desa Menuju Smart Village di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(2), 101–115.
- Sutopo, H. B. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Surakarta: UNS Press.